

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aneta, Asna. (2010).
- Dunn, William N. 2003: *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Edward, . *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Puwanto, Erwan Agus, Sulistyatuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Stephen P. Robbins. 1994. *Teori Organisasi Struktur Design dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2017. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*, Jakarta: CAPS (*Center of Academic Publishing Service*).

B. Dokumen dan Sumber Lain

Republik Ind, 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 th 2017 *tentang* Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Republik Ind, 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 th 2015 *tentang* Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Republik Ind, 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 *tentang* Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 *tentang* Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1354), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.